

RENCANA KERJA TAHUN 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Kerja ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang untuk satu tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Rencana Kerja ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini dimasa mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020.

Tebing Tinggi, Maret 2019

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Empat lawang**



Drs. Mohammad Mursadi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196812041990091001

AFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS	
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
 PINTU TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian	
Rencana Strategis	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN	
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
 BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dalam pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia

Dalam perencanaan Pembangunan daerah yang merupakan konsekuensi logis di berlakukannya Undang Undang nomor 32 tahun 2014 tentang rencana kerja (renja) SKPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien ,efektif, akuntable, partisipatif, terukur, berkeadilan pemerintahan daerah pada tingkatan SKPD dilakukannya penyusunan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang dinamakan rencana kerja (renja) SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah dan berkelanjutan.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada satu kesatuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kegiatan dan program sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Untuk Periode satu tahun, yaitu Tahun 2019, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Empat Lawang dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 - 2023 ke dalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran dan kegiatan Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Penyusunan RKPD.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dalam bentuk matriks.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi

Untuk efisiensi penyusunan Rencana Kerja yang strategis dan salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka hal ini dapat ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2018. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 diuraikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang antara lain : program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dan pencapaian Renstra sampai dengan 2018.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Empat Lawang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)	Realis asi Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01	4.01	20.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SKM OPD	85	60	70	65	93%	75	70	93%
4.01	4.01	20.01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output	3950	3.800	3.800	3.650	96%	3.800	3.700	97%
					Outcome								
4.01	4.01	20.01	2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	3	3	3	3	100%	3	3	100%
					Outcome								
4.01	4.01	20.01	8	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Output:	2	2	2	2	100%	2	2	100%
					Outcome:								

4.01	4.01	20.01	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Output:	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6	6	6	6	100%	6	6	100%
					Outcome:	Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja								
4.01	4.01	20.01	10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Output:	alat tulis kantor	80	55	65	60	95%	70	70	100%
					Outcome:	tersediannya alat tulis kantor								
4.01	4.01	20.01	11	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Output:	barang cetakan dan penggandaan	7	7	7	7	100%	7	7	100%
					Outcome:	tersediannya barang cetakan dan penggandaan								
4.01	4.01	20.01	15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output:	koran/majalah pertanian	5	4	4	4	90%	4	5	90%
					Outcome:	tersediannya koran/majalah pertanian								
4.01	4.01	20.01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Output:	Makanan dan Minuman	450	450	450	450	100%	450	450	100%
					Outcome:	Tersediannya Makanan dan Minuman								
4.01	4.01	20.01	18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output:	koordinasi dan konsultasi	15	10	10	10	100%	10	10	100%
					Outcome:	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah								
4.01	4.01	20.01	19	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Output:	koordinasi dan konsultasi	89	79	79	79	100%	79	79	100%
					Outcome:	terlaksananya rapat koordinasi ke dalam daerah								

4.01	4.01	20.01	20	Kegiatan Penyedia jasa Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran	Output:	jasa pendukung adm/teknis perkantoran	16	12	12	12	100%	16	16	100%
					Outcome:	Tersedianya Jasa Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran								
4.01	4.01	20.01	21	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Output:	jasa pendukung adm/teknis perkantoran	35	35	35	35	100%	35	35	100%
					Outcome:	tersedianya jasa teknis perkantoran								
4.01	4.01	20.02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%)		87,48%	77,48%	79%	60%	80%	81,48%	65%	70%
4.01	4.01	20.02	7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output:	Perlengkapan Gedung Kantor	1	1	1	1	100%	1	3	300%
					Outcome:	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor								
4.01	4.01	20.02	9	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output:	Peralatan Gedung Kantor	1	1	1	1	100%	1	3	300%
					Outcome:	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor								
4.01	4.01	20.02	10	Kegiatan Pengadaan Meubeler	Output:	Pengadaan Meubeler	1	1	1	1	100%	1	3	300%
					Outcome:	Tersedianya Meubeler								

4.01	4.01	20.02	23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Output:	Pemeliharaan Kendaraan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
					Outcome:	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan								
4.01	4.01	20.02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output:	Pemeliharaan Kendaraan	4	4	4	4	100%	4	4	100%
					Outcome:	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional								
4.01	4.01	20.02	35	Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output:	Pajak Kendaraan	5	5	5	5	100%	5	5	100%
					Outcome:	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan								
4.01	4.01	20.02	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Output:	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	1	1	100%	1	3	100%
					Outcome:	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor								
4.01	4.01	20.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Prosentase SDM yang mengikuti diklat/peningkatan kapasitas (%)		100%	0%	60%	40%	67%	20%	0%	0%
4.01	4.01	20.05	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output:	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	1	1	1	100%	0	0	0%
					Outcome:	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal								

4.01	4.01	20.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai Lakip		75	60	65	60	92%	59	55	93%
4.01	4.01	20.06	26	Penyusunan Lakip Kabupaten Empat Lawang	Output:	Laporan Lakip	75	60	65	60	92%	59	55	93%
					Outcome:	Tersedianya Laporan Lakip								
4.01	4.01	20.06	35	Penyusunan Renstra	Output:	Laporan Renstra	1	1	1	1	100%	1	0	0%
					Outcome:	Tersedianya Laporan Renstra								
4.01	4.01	20.15		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA dan PMDN)		38,5 T	3,5 T	4,5 T	3,5 T	80%	5,5T	3,5 T	70%
4.01	4.01	20.15	23	Mengikuti Pameran Investasi	Output:	Pameran Luar Daerah Luar Provinsi	2	1	1	1	100%	2	2	100%
					Outcome:	Tersedianya Pameran Investasi								
4.01	4.01	20.15	24	Kegiatan RUPM	Output:	Dokumen RUPM	1	1	0	0	0%	1	1	100%
					Outcome:	Tersedianya Dokumen RUPM								

4.01	4.01	20.15	25	Pembuatan Website DPMPTSP	Output:	Media Informasi Penanaman Modal	1	0	0	0	0%	1	1	100%
					Outcome:	Tersedianya Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal Daerah								
4.01	4.01	20.22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Lama Proses Perizinan (Hari)		5	8	8	8	100%	8	8	70%
4.01	4.01	20.22	02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan	Output:	Standar Operasional Prosedur	1	0	0	0	0%	1	1	100%
					Outcome:	Tersedianya Dokumen SOP								
4.01	4.01	20.22	08	Monitoring dan Evaluasi	Output:	Monitoring terhadap pelaku usaha	4	4	4	4	100%	4	4	100%
					Outcome:	Terlaksananya Monitoring								
4.01	4.01	20.22	10	Sosialisasi Perizinan	Output:	Sistematika Investasi	1	0	0	0	0%	0	0	0%
					Outcome:	Terlaksananya Sistematika Investasi								
4.01	4.01	20.28	14	Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha	Output:	Tim Kajian Teknis dan Tim Satgas	1	0	0	0	0%	0	0	0%
					Outcome:	Terlaksananya Tim Kajian Teknis dan Tim Satgas								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Empat lawang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indicator kinerja yang bersifat hasil (out come) dan menggambarkan indicator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang disajikan pada Tabel 2.2. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Empat Lawang

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				(n-2) 2018	(n-1) 2019	(n) 2020	(n+1) 2021	(n-2) 2018	(n-1) 2019	(n) 2020	(n+1) 2021	
1	Nilai Investasi	Angka		1,5 T	1,5 T	2,5 T	3,5 T	2 T	2,5 T	2,5 T	2,5 T	
2	Jumlah Investor Baru	Angka		7	7	8	9	7	7	7	7	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		65	70	75	80	65	70	70	70	
4	Jumlah Potensi Investasi yang Bebas Konflik Hukum	Dokumen		2	2	3	4	2	2	2	2	
5	Jumlah Investor yang Menandatangani Investasi Agreement	Dokumen		7	7	8	9	7	7	7	7	
6	Jumlah Peluang Investasi yang di Promosikan	Dokumen		5	5	5	6	5	5	5	5	
7	Lama Waktu Pengurusan Perizinan	Dokumen		11 Hari	10 Hari	9 Hari	8 Hari	11 Hari	10 Hari	10 Hari	10 Hari	
8	Persentase Perizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	%		60 %	60 %	70 %	80 %	60 %	60 %	60 %	60 %	
9	Jumlah Potensi Investasi yang Nol Konflik	Dokumen		2	2	2	1	2	2	2	2	

10	Jumlah Hak-Hak Investor yang Dilindungi	Dokumen		5	5	6	7	5	5	5	5	
11	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan dan Disesuaikan Secara Reguler	Dokumen		2	2	3	3	2	2	2	2	
12	Jumlah Regulasi Investasi yang Telah Disesuaikan Sesuai Standar	Dokumen		3	3	4	4	3	3	3	3	
13	Jumlah Even Pameran Promosi Investasi yang Diikuti	Dokumen		2	3	4	5	2	3	3	3	
14	Jumlah Jaringan Promosi Investasi Online dan Offline	Dokumen		2	3	4	5	2	3	3	3	
15	Jumlah Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen		2	2	3	4	2	2	2	2	
16	Jumlah Aplikasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Dikembangkan Sesuai Standar	Angka		1	1	2	2	1	1	1	1	
17	Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diakses Oleh Investor	Angka		3	3	4	5	3	3	3	3	
18	Persentase Penurunan Pengaduan	%		50%	40%	30%	20%	50%	40%	40%	40%	
19	Persentase Sengketa Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan	%		50%	60%	70%	80%	50%	60%	60%	60%	
20	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Mempunyai Kapabilitas Sesuai Standar	Angka		4	5	6	7	4	5	5	5	

21	Jumlah Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti	Angka		2	2	3	3	2	2	2	2	
22	Jumlah Dokumen SOP Kebijakan Perlindungan Hak Investor	Dokumen		3	3	4	5	3	3	3	3	
23	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan	Dokumen		1	1	2	2	1	1	1	1	
24	Jumlah Regulasi yang Terukur	Dokumen		3	3	4	5	3	3	3	3	
25	Jumlah Peluang Investasi	Dokumen		5	5	6	7	5	5	5	5	
26	Jumlah Promosi Media Online dan Offline	Dokumen		2	2	3	4	2	2	2	2	
27	Jumlah Izin yang dikenakan Biaya	Dokumen		8	8	6	4	8	8	8	8	
28	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen		4	4	5	5	4	4	4	4	
29	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Diterapkan	Angka		2	2	2	2	2	2	2	2	
30	Jumlah Kebijakan Pelayanan yang Dibuat	Dokumen		3	3	3	4	3	3	3	3	
31	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Bersertifikat	Angka		2	2	3	4	2	2	2	2	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawangme dapat ditinjau dari beberapa isu penting yang menunjang terselenggaranya target dalam pelayanan kepada masyarakat, isu tersebut antara lain :

1. Pelayanan perizinan berbasis elektronik
2. Peningkatan pelayanan perizinan yang lebih prima :
 - Peningkatan sarana dan prasarana
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
4. Kajian Kebijakan Penanaman Modal (RUPM)
5. Kawasan Industri
6. Pengembangan Potensi Daerah

Pembuatan rencana kerja ini harus efektif dan efisien, hal ini terletak pada teknis pembuatannya yang memandang aspek aspek dasar seperti kekuatan Kelemahan, Peluang dan Tantangan sehingga tercapai target tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun uraiannya aspek aspek dasar penyusunan rencana kerja ini sebagai berikut :

Kekuatan (strength)

- a. Dukungan sumber daya manusia sebanyak 27 orang yang terdiri dari 15 orang PNS dan 12 orang pegawai honorer.
- b. Dukungan financial Dana Pembangunan Tahun Anggaran 2019.
- c. Adanya perangkat peraturan-perundangan yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan tata Kerja DPMPTSP.

Kelemahan (Weakness)

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk membuat izin.
- c. Adanya kebijakan teknis dari departemen sektoral yang mempengaruhi pelayanan perizinan.

Peluang (Opportunity)

- a. Banyaknya pengusaha yang akan menanamkan modal.
- b. Adanya kebijakan pemerintah yang akan menertibkan setiap kegiatan atau usaha masyarakat.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.

Tantangan (Threats)

- a. Perlu ditingkatkan kemampuan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayan Terpadu satu Pintu.
- b. Sistem Pelayanan Perizinan belum berjalan secara optimal.
- c. Kurangnya sarana promosi penanaman modal.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas tugas.
- e. Pelaku usaha belum terdata secara akurat.
- f. Kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap lingkungan.
- g. Kurangnya perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dengan arahan Bupati Empat Lawang terkait prioritas program atau kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Tabel 2.3 berikut memberikan gambaran indentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, Perguruan Tinggi yang ditunjuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat sampai saat ini belum ada.

TABEL 2.3

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Empat Lawang	Nilai SKM	B	Rp938.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Empat Lawang	Nilai SKM	B	Rp816.800.000
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Empat Lawang	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Rp30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Empat Lawang	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Rp20.000.000
3	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Empat Lawang	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp70.000.000	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Empat Lawang	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp60.000.000
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Empat Lawang	tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang 12 bulan	Rp27.000.000	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Empat Lawang	tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang 12 bulan	Rp27.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Empat Lawang	Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Rp35.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Empat Lawang	Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Rp25.000.000
6	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Empat Lawang	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Rp75.000.000	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Empat Lawang	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Rp68.000.000
7	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Empat Lawang	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp55.000.000	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Empat Lawang	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp30.000.000
8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Empat Lawang	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	Rp34.000.000	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Empat Lawang	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	Rp23.000.000

9	Penyediaan Makan dan Minum	Empat Lawang	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	Rp35.000.000	Penyediaan Makan dan Minum	Empat Lawang	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	Rp22.000.000
10	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Empat Lawang	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	Rp180.000.000	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Empat Lawang	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	Rp150.000.000
11	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Empat Lawang	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	Rp150.000.000	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Empat Lawang	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	Rp130.000.000
12	Kegiatan Penyedia jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran	Empat Lawang	Tersedianya Jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran	14 Orang 12 bulan	Rp214.000.000	Kegiatan Penyedia jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran	Empat Lawang	Tersedianya Jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran	14 Orang 12 bulan	Rp241.800.000
13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Empat Lawang	tersedianya jasa teknis perkantoran	12 Bulan	Rp33.000.000	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Empat Lawang	tersedianya jasa teknis perkantoran	12 Bulan	Rp20.000.000
14	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Empat Lawang	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%)	81,48%	Rp1.842.000.000	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Empat Lawang	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%)	81,48%	Rp169.000.000
15	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Empat Lawang	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp80.000.000	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Empat Lawang	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp12.000.000
16	Pengadaan Mobil dan Motor Dinas	Empat Lawang	Tersedianya Mobil dua Kabin dan 2 Motor Dinas	12 Bulan	Rp570.000.000	Pengadaan Mobil dan Motor Dinas	Empat Lawang	Tersedianya Mobil dua Kabin dan 2 Motor Dinas	12 Bulan	Rp0
17	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Empat Lawang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp50.000.000	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Empat Lawang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp25.000.000
18	Kegiatan Pengadaan Meubeler	Empat Lawang	Tersedianya Meubeler	12 Bulan	Rp50.000.000	Kegiatan Pengadaan Meubeler	Empat Lawang	Tersedianya Meubeler	12 Bulan	Rp15.000.000
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Empat Lawang	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan	1 Unit Mobil	Rp40.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Empat Lawang	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan	1 Unit Mobil	Rp30.000.000
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Empat Lawang	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Mobil, 2 Unit Motor	Rp45.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Empat Lawang	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Mobil, 2 Unit Motor	Rp40.000.000

21	Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Empat Lawang	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	Rp7.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Empat Lawang	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	Rp7.000.000
22	Rehab sedang / berat gedung kantor	Empat Lawang	Tersedianya Ruang Kantor yang baru	12 Bulan	Rp1.000.000.000	Rehab Ruang Kantor	Empat Lawang	Tersedianya Ruang Kantor yang baru	12 Bulan	Rp40.000.000
23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Empat Lawang	Persentase Meningkatnya Disiplin aparatur (%)	92%	Rp150.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Empat Lawang	Persentase Meningkatnya Disiplin aparatur (%)	92%	Rp80.000.000
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Empat Lawang	Terpenuhiya Kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100 stel	Rp150.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Empat Lawang	Terpenuhiya Kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100 stel	Rp80.000.000
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Empat Lawang	Peresentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp80.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Empat Lawang	Peresentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp25.000.000
26	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Empat Lawang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bimtek 9 orang, Pelatihan 7 orang	Rp80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Empat Lawang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bimtek 9 orang, Pelatihan 7 orang	Rp25.000.000
27	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Empat Lawang	Nilai Lakip	C	Rp25.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Empat Lawang	Nilai Lakip	C	Rp20.000.000
28	Penyusunan Lakip	Empat Lawang	Tersedianya Lakip	Dokumen	Rp15.000.000	Penyusunan Lakip	Empat Lawang	Tersedianya Lakip	Dokumen	Rp10.000.000
29	Penyusunan SPM	Empat Lawang	Tersedianya SPM	Dokumen	Rp10.000.000	Penyusunan SPM	Empat Lawang	Tersedianya SPM	Dokumen	Rp10.000.000
30	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Empat Lawang	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	5,6 Trilyun	Rp575.000.000	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Empat Lawang	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	5.600.000.000.000	Rp793.000.000
31	Mengikuti Pameran Investasi	Empat Lawang	Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Dokumen, Booklet, dan leaflet	Rp150.000.000	Mengikuti Pameran Investasi	Empat Lawang	Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Dokumen, Booklet, dan leaflet	Rp300.000.000
32	Pelaksanaan Forum Bisnis	Empat Lawang	Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi	1 Kali	Rp250.000.000	Pelaksanaan Forum Bisnis	Empat Lawang	Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi	1 Kali	Rp200.000.000

33	Pelaksanaan Cofee Morning / Talk Bisnis	Empat Lawang	Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 kali	Rp75.000.000	Pelaksanaan Cofee Morning / Talk Bisnis	Empat Lawang	Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	Rp0
34	Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri	Empat Lawang	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Booklet dan Leaflet	Rp100.000.000	Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri	Empat Lawang	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Booklet dan Leaflet	Rp293.000.000
35	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Empat Lawang	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10 Investor	Rp575.000.000	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Empat Lawang	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10 Investor	Rp10.000.000
36	Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Empat Lawang	Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Dokumen, Booklet, dan leaflet	Rp150.000.000	Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Empat Lawang	Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal	Dokumen, Booklet, dan leaflet	Rp0
37	Penelitian Potensi Investasi	Empat Lawang	Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi	1 Kali	Rp250.000.000	Penelitian Potensi Investasi	Empat Lawang	Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi	1 Kali	Rp0
38	Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Empat Lawang	Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	Rp75.000.000	Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Empat Lawang	Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	Rp10.000.000
39	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Empat Lawang	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Booklet dan Leaflet	Rp100.000.000	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Empat Lawang	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Booklet dan Leaflet	Rp0
40	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Empat Lawang	Lama Proses Perizinan (Hari)	8 Hari	Rp725.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Empat Lawang	Lama Proses Perizinan (Hari)	8 Hari	Rp466.200.000
41	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Empat Lawang	Tersedianya SOP	Dokumen	Rp15.000.000	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Empat Lawang	Tersedianya SOP	Dokumen	Rp0
42	Monitoring dan Evaluasi	Empat Lawang	Terlaksananya Monitoring	4 kali	Rp100.000.000	Monitoring dan Evaluasi	Empat Lawang	Terlaksananya Monitoring	4 kali	Rp100.000.000
43	Sosialisasi Perizinan	Empat Lawang	Terlaksananya Sistematika Investasi	1 kali	Rp100.000.000	Sosialisasi Perizinan	Empat Lawang	Terlaksananya Sistematika Investasi	1 kali	Rp70.000.000

44	Kejian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha	Empat Lawang	Terlaksananya kajian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha	Dokumen	Rp250.000.000	Kejian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha	Empat Lawang	Terlaksananya kajian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha	Dokumen	Rp166.200.000
45	survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan PM	Empat Lawang	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pebluk di bidang perizinan dan PM	Dokumen	Rp10.000.000	survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan PM	Empat Lawang	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pebluk di bidang perizinan dan PM	Dokumen	Rp10.000.000
46	Fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi	Empat Lawang	Tersedianya fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi	Aplikasi	Rp100.000.000	Fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi	Empat Lawang	Tersedianya fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi	Aplikasi	Rp50.000.000
47	pembuatan aplikasi	Empat Lawang	Terlaksananya Pembuatan aplikasi	Aplikasi	Rp150.000.000	pembuatan aplikasi	Empat Lawang	Terlaksananya Pembuatan aplikasi	Aplikasi	Rp70.000.000
JUMLAH					Rp4.644.000.000					Rp2.380.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam penyusunan rencana kerja ini harus dilakukan secara terarah agar dalam pelaksanaan selalu mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam hal ini dapat diuraikan antara lain :

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional

Arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang antara lain melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kearsipan serta perumusan kebijakan dan program serta pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Tujuan merupakan penyebaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yaitu Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing.

➤ Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai dengan yang akan dicapai oleh setiap instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
2. Terciptanya Pelayanan Perizinan Prima

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang mengacu kepada Tahapan Perencanaan dan Prioritas Daerah 2019 yaitu Peningkatan Ekonomi Berbasis Masyarakat yang meliputi :

1. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Penyerderhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan
 - b. Membentuk Tim Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - c. Pengadaan Sistem Aplikasi e-monev
 - d. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur
 - e. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di bidang perizinan dan penanaman modal
 - f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan
 - g. Sistem informasi layanan perizinan
2. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
 - a. Penyusunan Master Plan pengembangan Penanaman Modal
 - b. Peningkatan kerjasama strategis(kemitraan) untuk Pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi Investasi daerah
 - c. Pengembangan potensi unggulan daerah
 - d. Pameran dan temu usaha di dalam maupun di luar negeri
 - e. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
 - f. Kajian Kebijakan Penanaman Modal (RUPM)
3. Pembinaan dan Fasilitasi Investor yang ada :
 - a. Koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

- b. Fasilitas dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
- c. Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- d. Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu
- e. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama antara usaha besar dengan usaha kecil menengah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran sasaran program dan kegiatan sesuai tema pembangunan Kabupaten Empat Lawang dengan sasaran sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai pelaku utama.
4. Realistis dan dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang menyusun Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Makan dan Minum
 - i. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah
 - k. Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
 - l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Mobil dan Motor Dinas
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Meubiler
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
 - g. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pengadaan Ruang Rapat
 - i. Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telpon
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan non Formal
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Penyusunan Lakip
- 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi :
 - a. Mengikuti Pameran Investasi
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
- 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
 - a. Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sosialisasi Perizinan
 - c. Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - d. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
- 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :
 - a. Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal
- 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan dan Capaian Kerja :
 - a. Penyusunan Laporan SPM
- 9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

TABEL 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Empat Lawang tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
									Sumber Dana	Jumlah Pagu (Rp)			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG					2.380.000.000			3.537.000.000
4	01				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					1.110.800.000			1.597.000.000
4	01	4.01.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SKM		67		816.800.000			1.052.000.000
4	01	4.01.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Empat Lawang	3 Jenis	APBD KAB	20.000.000	-	3 Jenis	25.000.000
4	01	4.01.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 RekeningTelepon 1 Rekening Air 2 Rekening Listrik	Empat Lawang	4 rekening	APBD KAB	60.000.000	-	4 rekening	75.000.000
4	01	4.01.20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Empat Lawang	3 Orang	APBD KAB	27.000.000	-	3 Orang	27.000.000
4	01	4.01.20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Komputer, AC, TV, Printer dan Laptop)	Empat Lawang	5 Jenis	APBD KAB	25.000.000	-	5 Jenis	40.000.000

4	01	4.01.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (50 Rim Kertas HVS, Catridge Hitam 10 Buah ,Catridge Warna 10 Buah, Pena Balliner 100 Buah Tinta Printer Hitam 40 Kotak, Tinta Printer Warna 40 Kotak dll)	Empat Lawang	35 Jenis	APBD KAB	68.000.000	-	35 Jenis	80.000.000
4	01	4.01.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetak Amplop, Kwitansi,Blanko, Piagam Perizinan, Cetak Maf, Fotocopy dan Penjilitan)	Empat Lawang	7 Jenis	APBD KAB	30.000.000	-	7 Jenis	60.000.000
4	01	4.01.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Empat Lawang	5000 Eks	APBD KAB	23.000.000	-	5000 Eks	35.000.000
4	01	4.01.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Snack	Empat Lawang	100 Kotak	APBD KAB	22.000.000	-	150 Kotak	40.000.000
						Tersedianya makan		100 Kotak				150 Kotak	
						Tersedianya minum		100 Buah				150 Buah	
4	01	4.01.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Empat Lawang	10 Kali	APBD KAB	150.000.000	-	12 Kali	180.000.000
4	01	4.01.20	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Empat Lawang	78 Kali	APBD KAB	130.000.000	-	88 Kali	170.000.000

4	01	4.01.20	01	20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Empat Lawang	15 Orang	APBD KAB	241.800.000	-	18 Orang	285.000.000
4	01	4.01.20	01	22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (Kain Pel, Sapu, Pewangi Ruangan, Kaset Kaki, Pembersih Lantai, Tisu DLL)	Empat Lawang	20 Jenis	APBD KAB	20.000.000	-	25 Jenis	35.000.000
4	01	4.01.20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		81,48	APBD KAB	169.000.000			425.000.000
4	01	4.01.20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC)	Empat Lawang	2 Buah	APBD KAB	12.000.000	-	2 Buah	100.000.000
4	01	4.01.20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer PC)	Empat Lawang	2 Unit	APBD KAB	25.000.000	-	4 Unit	50.000.000
4	01	4.01.20	02	10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Lemari Arsip	Empat Lawang	2 Unit	APBD KAB	15.000.000	-	2 Unit	50.000.000
						Tersedianya Kursi		10 Unit	APBD KAB			10 Unit	
						Tersedianya Meja		6 Unit	APBD KAB			6 Unit	

4	01	4.01.20	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Empat Lawang	10 Jenis	APBD KAB	30.000.000	-	10 Jenis	40.000.000
4	01	4.01.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	Empat Lawang	2 Unit	APBD KAB	40.000.000	-	2 Unit	45.000.000
						Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua		2 Unit	APBD KAB			2 Unit	
4	01	4.01.20	02	35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda Empat	Empat Lawang	3 Unit	APBD KAB	7.000.000	-	3 Unit	15.000.000
						Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda dua		2 Unit	APBD KAB			2 Unit	
4	01	4.01.20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Empat Lawang	2 Ruang	APBD KAB	40.000.000	-	2 Ruang	125.000.000
4	01	4.01.20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		92	APBD KAB	80.000.000			0

4	01	4.01.20	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu	Empat Lawang	111 stel	APBD KAB	80.000.000	-	111 stel	0
4	01	4.01.20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat/pelatihan dengan nilai baik		40	APBD KAB	25.000.000			90.000.000
4	01	4.01.20	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Empat Lawang	5 Orang	APBD KAB	25.000.000	-	18 Orang	90.000.000
4	01	4.01.20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip		62	APBD KAB	20.000.000			30.000.000
4	01	4.01.20	06	11	Penyusunan Lakip	Tersedianya Laporan Perencanaan dan Keuangan (LAKIP)	Empat Lawang	1 Dokumen	APBD KAB	10.000.000	-	1 Dokumen	15.000.000
4	01	4.01.20	06	27	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya Laporan SPM	Empat Lawang	1 laporan	APBD KAB	10.000.000	-	1 laporan	15.000.000
4	12				PENANAMAN MODAL				APBD KAB	803.000.000			1.080.000.000
4	12	4.01.20	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam milyar)		1	APBD KAB	793.000.000			1.030.000.000
						Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam milyar)		1,5	APBD KAB				
4	12	4.01.20	15	23	Mengikuti Pameran Investasi	Tersedianya Pameran Investasi	Empat Lawang	3 Kali	APBD KAB	300.000.000	-	3 Kali	330.000.000

4	12	4.01.20	15	29	Pelaksanaan Forum Bisnis	Tersedianya pertemuan dengan Investor	Empat Lawang	1 Kali	APBD KAB	200.000.000	-	1 Kali	400.000.000
4	12	4.01.20	15	31	Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri (Eksibisi Kopi Regional)	Empat Lawang	1 Event	APBD KAB	293.000.000	-	1 Event	300.000.000
4	12	4.01.20	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Jumlah Investor Baru		12	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
4	12	4.01.20	16	20	Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak Dan Elektronik (Koran)	Empat Lawang	2 Kali	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
4	01				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
4	01	4.01.20	28		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (Hari)		8	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
						Nilai SKM		75	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
4	01	4.01.20	28	08	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Dokumen Monitoring Perizinan Terhadap Pelaku Usaha	Empat Lawang	4 Kali	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
4	01	4.01.20	28	10	Sosialisasi Perizinan	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan	Empat Lawang	1 Kali	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB

4	01	4.01.20	28	14	Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Tersedianya Dokumen Tim Kajian Teknis Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Empat Lawang	1 Dokumen	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB	APBD KAB
4	01	4.01.20	28	23	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan PM	Tersedianya Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan Dan PM	Empat Lawang	1 Dokumen	APBD KAB	10.000.000	-	1 Dokumen	10.000.000
4	01	4.01.20	28	25	Fasilitasi Penyusunan Kelengkapan Aplikasi	Tersedianya Aplikasi Peningkatan Pelayanan Perizinan	Empat Lawang	1 Aplikasi	APBD KAB	50.000.000	-	1 Aplikasi	150.000.000
4	01	4.01.20	28	26	Pembuatan Aplikasi	Tersedianya Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan Perizinan	Empat Lawang	1 Aplikasi	APBD KAB	70.000.000	-	1 Aplikasi	200.000.000
Jumlah total : (33 kegiatan)										2.380.000.000			3.537.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 merupakan gambaran kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima dibidang perizinan kepada masyarakat dan dalam dokumen perencanaan tersebut terlihat dengan jelas langkah langkah yang akan ditempuh dalam mewujudkannya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melakukan program dan kegiatan tahunan, sehingga akan memudahkan pelaksanaan (realisasinya).

Kita menyadari betapa baiknya program dan kegiatan yang dibuat tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dana dan semua pihak. Untuk itu saran dan pendapat yang konstruktif serta dukungan dari instansi maupun pihak terkait dan berkepentingan sangat diharapkan dalam rangka mendukung program dan kegiatan tersebut sebagai upaya ikut mensukseskan visi misi pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam mewujudkan “Empat lawang EMASS GEMILANG” (ekonomi Maju Aman Sehat Sejahtera).